

# 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka penyusunan Renja OPD didasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra BPBD, Kesbangpol Tahun 2018-2023 serta perencanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023), sehingga penyusunan Renja BPBD, Kesbangpol Tahun 2021 ini berpedoman pada Renstra BPBD, Kesbangpol dan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, dalam rangka melaksanakan rencana yang telah dirumuskan melalui kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023. Disamping itu Renja BPBD, Kesbangpol Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Badan Penaggulangan Bancana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang serta bertugas dan berfungsi membantu Kepala Daerah dalam hal masalah memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana yaitu: saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, berkewajiban untuk menyusun Renja BPBD, Kesbangpol Tahun 2021 disusun secara sistematis dan analisis dengan memperhatikan isu serta perkembangan kondisi terkini penyusunan rencana pembangunan, terutama sekali dalam rangka pencapaian target pembangunan lima tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Secara legalitas formal, penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2020 Dasar hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2002 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja BPBD, Kesbangpol ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program BPBD, Kesbangpol secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang.
2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BPBD, Kesbangpol untuk tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud diatas Rencana Kerja BPBD, Kesbangpol ini di tujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf BPBD, Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2021.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD, Kesbangpol pada tahun 2021.
4. Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

### **1.4. Sistematika Renja BPBD, Kesbangpol**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol Tahun Lalu yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPBD, Kesbangpol *Analisis Kinerja Pelayanan BPBD*, Kesbangpol *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD*, Kesbangpol *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang).
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan, yang terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan Sasaran Renja BPBD, Kesbangpol Program dan Kegiatan BPBD, Kesbangpol.
- BAB IV : Penutup

# 2

## **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD, KESBANGPOL TAHUN 2019**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang dan/atau realisasi APBD untuk BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2019 pada umumnya terlaksana 100%, Namun ada 9 kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan karna kegiatan ini Insidentil.

#### **2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Kegiatan yang tidak memenuhi target sesuai dengan rencana awal adalah :

- a. Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Realisasi capaian target kegiatan ini hanya 1.689.500,- (28,16%) dari taget 6.000.000 yang ditetapkan, realisasi fisik kegiatan ini tetap 100% di karenakan Kegiatan ini sifatnya Insidentil.
- b. Verifikasi dan Validasi kerusakan dan Kerugian Pasca Bancana dari target yang direncanakan hanya 9.810.950,- (59,55 %) yang di tetapkan, dari target 16.475.000,- yang di tetapkan, realisasi fisik kegiatan ini 100 % dikarenakan kegiatan ini sifatnya insedentil.
- c. Kewaspadaan dini Daerah dari target yang rencanakan hanya 1.612.950,- (8,77%) dari taget 18.400.000,- yang ditetapkan, realisasi fisik kegiatan ini tetap 75 % dikarenakan kegiatan ini belum dilaksanakan pada tahun 2019 mengingat pedoman pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Daerah belum ditetapkan, sementara daerah masih menggunakan format Kominda.

- d. Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan jumlah dana Rp. 23.720.000,- Kegiatan ini di bertujuan untuk memberikan sosialisasi dengan sasaran pelajar se Kota Padang Panjang kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.586.500,- (53.06%). Kegiatan ini dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan melalui sosialisasi bagi tokoh-tokoh pendidik dan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi namun kendala yang dihadapi adalah model kegiatan yang monoton dari tahun ke tahun, yaitu hanya diskusi atau ceramah saja.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dengan jumlah dana Rp. 26.400.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya Kerukunan antar Umat Beragama di Kota Padang Panjang Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.475.600,- (54,83%). kegiatan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di kegiatan FKUB. Kegiatan rapat-rapat sudah dilaksanakan namun terkendala dengan jadwal masing-masing anggota forum yang saling bertabrakan.
- f. Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing, dari target yang rencanakan hanya 83.391.577,- (52,67%) dari taget 158.325.000,- yang ditetapkan, realisasi fisik kegiatan ini tetap 100% dikarenakan kegiatan ini sifatnya Insidentil, kegiatan ini dikarenakan secara umum rapat-rapat dan monitoring terhadap orang asing NGO dan lembaga asing sudah dilaksanakan secara rutin namun untuk kegiatan study Banding tidak jadi dilaksanakan dikarenakan daerah tujuan belum siap untuk menerima kunjungan Pengawasan Orang Asing NGO dan lembaga asing kota Padang Panjang.
- g. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial degan jumlah dana Rp. 572,175.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 262.557.121,- (45.89%). sifat Dari kegiatan ini telah terciptanya stabilitas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.



- h. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.* dengan jumlah dana Rp. 20.955.000,-. Realisasi Fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.985.750,- (33,34%) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Padang Panjang, agar terciptanya hubungan yang bersinergi antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Padang Panjang dan terlaksananya pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Kota padang Panjang, dan juga telah di dapat data Organisasi yang sudah berbadan hukum namun belum terdaftar di Kota Padang Panjang dan Organisasi-organisasi lainnya yang bersifat lokal.
- i. Penelitian Administrasi Bantuan Partai* dengan jumlah dana Rp. 20.470.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang proses administrasi dana bantuan bagi Partai Politik pemenang Pemilu. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.665.450,- (22.79%).
- pada kegiatan ini dikarenakan kegiatan penelitian administrasi bantuan kerja partai sudah dilaksanakan, terbukti pada tahun 2019 telah terlaksana 2 tahap pencairan bantuan keuangan bagi partai politik. Namun, untuk kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu dan ketersediaan Narasumber dari instansi di luar Pemerintah Kota Padang Panjang seperti BPK dan lain-lain.

### **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang menetapkan 9 Program dan 35 Kegiatan guna memenuhi target Renstra yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam se Kota Padang Panjang, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat),

Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan serta Program Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah

Dari 35 Kegiatan yang ada, 26 kegiatan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan diatas 60%. Hal ini seperti terlihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

No	Program /Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN</b>	<b>1.004.027.800</b>	<b>852.472.484</b>	<b>84,91%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	2.600.000	2.358.000	90,69%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.498.734	17.609.279	81,91%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	364.260.666	263.754.559	72,41%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	131.137.400	106.599.472	81,29%
5	Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor	25.000.000	24.665.000	98,66%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	23.131.000	17.763.500	76,80%
8	Penyediaan Makan Minum	50.400.000	44.921.700	89,13%
9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	380.000.000	373.111.474	98,19%
II.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.</b>	<b>65.000.000</b>	<b>60.688.600</b>	<b>93,37%</b>
10	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.	50.000.000	49.946.000	99,89%
10	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor.	15.000.000	10.742.600	71,62%
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.557.800</b>	<b>99,41%</b>
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	74.557.800	99,41%
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>41.750.000</b>	<b>38.035.800</b>	<b>91,10%</b>
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	41.750.000	38.035.800	91,10%
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PERENCANAAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.487.500</b>	<b>99,17%</b>
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	500.000	500.000	100,00%
14	Penyusunan Pelaporan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah .	1.000.000	987.500	98,75%
VI	<b>PROGRAM PENCEGAH DINI DAN</b>	<b>1.756.381.000</b>	<b>1.568.594.370</b>	<b>89,31%</b>

No	Program /Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
	<b>PENANGGULANGAN BENCANA ALAM</b>			
15	Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bencana	81.255.000	68.136.750	83,86%
16	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan resiko bencana	106.525.000	104.816.350	98.40%
17	Operasional Pusdalops	927.766.000	873.091.520	94,11%
18	Operasional Tim Reaksi Cepat Penaggulangan Bencana	282.650.000	201.535.050	71,30%
19	Pengadaan Sarana dan Prasana Evakuasi Penduduk dan Ancaman/Korban bancana Alam	148.875.000	141.755.000	95,22%
20	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam	149.260.000	131.256.250	87,94%
21	Penyusunan ( JitunPasna, Dalsa, HRNA ) dan PDNA	43.575.000	38.192.500	87,65%
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT)</b>	<b>116.730.000</b>	<b>86.267.500</b>	<b>73,90%</b>
22	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan/Peredaran Gelap Norkoba (P4GN)	116.730.000	86.267.500	73,90%
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH</b>	<b>1.018.441.250</b>	<b>572.650.324</b>	<b>56,23%</b>
23	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	263.275.000	167.646.600	63,68%
24	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Poitik bagi Pemilih Pemula	26.450.000	19.966.750	75,49%
25	Sosialisasi Undang-Undang	15.540.000	12.774.800	82,21%
26	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presidin dan Wakil Presiden	99.576.250	98.053.853	98,47%
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.257.525.050</b>	<b>3.321.217.849</b>	<b>71,91%</b>

### **2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Tidak terdapat program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang telah direncanakan.

### **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya program/kegiatan pada BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang dikarenakan Kegiatan ini sifatnya Insidentil, sedangkan faktor penyebab terpenuhi target kinerja adalah adanya regulasi yang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

#### **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Dari review berdasarkan target kinerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renstra BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang 2018-2023, realisasi capaian kinerja kurang dari 100%. Pencapaian target program/kegiatan terhadap Implikasi capaian program Renstra telah mencapai 100% target yang ditetapkan.

#### **2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kasatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang dan Pencapaian Renstra BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN ( 2020 )**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan berjalan Realisasi Capaian Target SKPD s/d Tahun 2020	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Keluaran Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN WAJIB</b>									
	<b>Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
6	xx 01 01	I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN</b>	<b>Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran</b>						
6	xx 01 01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen	100 %	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen	-

							pengukuran kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja		perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan pengukuran kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja	bulanan, 4 dokumen laporan pengukuran kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja		laporan pengukuran kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja		
6	xx	01	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan		60 tagihan	60 tagihan	100 %	60 tagihan	-	-
6	xx	01	01	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL		6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	100 %	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	-	-
6	xx	01	01	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 orang THL, 1 Tahun		2 orang THL, 1 Tahun	2 orang THL, 1 Tahun	100 %	2 orang THL, 1 Tahun	-	-
6	xx	01	01	5	Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat kantor yang disediakan	30 jenis		30 jenis	30 jenis	100 %	30 jenis	-	-
6	xx	01	01	6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis		6 jenis	6 jenis	100 %	6 jenis	-	-
6	xx	01	01	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis		10 jenis	10 jenis	100 %	10 jenis	-	-
6	xx	01	01	8	Penyediaan Makan Minum	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	24 kali		24 kali	24 kali	100 %	24 kali	-	-

6	xx	01	01	9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	35 kali		35 kali	35 kali	100 %	35 kali	-	-
6	xx	01	01	II.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
6	xx	01	01	10	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung		1 gedung	1 gedung	100 %	1 gedung	-	-
6	xx	01	01	11	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor.	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	10 jenis		10 jenis	10 jenis	100 %	10 jenis	-	-
6	xx	01	01	III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>								
6	xx	01	01	12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	10 orang		10 orang	10 orang	100 %	10 orang	-	-
6	xx	01	01	IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Aparatur yang mematuhi peraturan Disiplin aparatur</b>								
6	xx	01	01	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	80 stel pakaian dinas		80 stel pakaian dinas	80 stel pakaian dinas	100 %	80 stel pakaian dinas	-	-
6	xx	01	01	V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu</b>								
6	xx	01	01	14	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%		100%	100%	100 %	100%	-	-
6	xx	01	01	15	Penyusunan Pelaporan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah .	Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan	100%		100%	100%	100 %	100%	-	-

						keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun								
6	xx	01	01	VI	<b>PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM</b>	<b>Kelurahan Tangguh Bencana</b>		-			-			
6	xx	01	01	16	Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan	4 kali		4 kali	4 kali	100 %	4 kali	-	-
6	xx	01	01	17	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan resiko bencana	Jumlah peserta jambore pengurangan rasiko bancana	15 orang, 160 orang		15 orang, 160 orang	15 orang, 160 orang	100 %	15 orang, 160 orang	-	-
6	xx	01	01	18	Operasional Pusdalops	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional	22 orang		22 orang	22 orang	100 %	22 orang	-	-
6	xx	01	01	19	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Jumlah kasus yang tangani	100 kasus		100 kasus	100 kasus	100 %	100 kasus	-	-
6	xx	01	01	20	Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Jumlah kerusakan yang di verifikasi	50 kasus		50 kasus	50 kasus	100 %	50 kasus	-	-
6	xx	01	01	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dan Ancaman/Korban bencana Alam	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	20 jenis		20 jenis	20 jenis	100 %	20 jenis	-	-
6	xx	01	01	22	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah masyarakat yang di latih dan Jumlah aparatur yang di latih	160 orang		160 orang	160 orang	100 %	160 orang	-	-
6	xx	01	01	23	Penyusunan (Jitu Pasna, Dalsa, HRNA ) dan PDNA	Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang dilaksanakan	40 orang		40 orang	40 orang	100 %	40 orang	-	-



6	xx	01	01	VII	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>	<b>Terciptanya Stabilitas daerah Kota Padang Panjang</b>								
6	xx	01	01	24	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan/ Peredaran Gelap Norkoba (P4GN)	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	50 orang		50 orang	50 orang	100 %	50 orang	-	-
6	xx	01	01	VIII	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang, Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada</b>		-						
6	xx	01	01	25	Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah pertemuan tim	12 kali	-	12 kali	12 kali	75 %	12 kali	-	-
6	xx	01	01	26	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	60 orang		60 orang	60 orang	100 %	60 orang	-	-
6	xx	01	01	27	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	6 pertemuan		6 pertemua n	6 pertemuan	100 %	6 pertemuan	-	-
6	xx	01	01	28	Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	11 orang/ LSM		11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	85 %	11 orang/ LSM	-	-
6	xx	01	01	IX	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH</b>	<b>Terciptanya Sabilitas Politik daerah Kota Padang Panjang</b>								
6	xx	01	01	29	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	persentase konflik sosial yang tertangani	90%		90%	90%	100 %	90%	-	-

6	xx	01	01	30	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar	7 kali 50 org	-	7 kali 50 org	7 kali 50 org	100 %	7 kali 50 org	-	-
6	xx	01	01	31	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah tim terpadu dan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	55 ormas		55 ormas	55 ormas	85 %	55 ormas	-	-
6	xx	01	01	32	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	Jumlah pemilih yang dididik	100 orang		100 orang	100 orang	100 %	100 orang	-	-
6	xx	01	01	33	Penelitian Administrasi Bantuan Partai	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina	9 parpol		9 parpol	9 parpol	85 %	9 parpol	-	-
6	xx	01	01	34	Sosialisasi Undang-Undang	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan	50 orang		50 orang	50 orang	100 %	50 orang	-	-
6	xx	01	01	35	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Lama pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3 bulan		3 bulan	3 bulan	100 %	3 bulan	-	-

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG**

**MARWILIS, SH, M.Si  
NIP. 19610703 198203 1008**

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan politik sesuai Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan politik merupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang penanggulangan bencana maupun di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di bidang penanggulangan bencana, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

Pada tahap pra bencana telah dilaksanakan beberapa kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Penyiapan produk hukum daerah dibidang penanggulangan bencana, pembenahan kelembagaan BPBD, Kesbangpol dan pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana merupakan prioritas yang sedang dilaksanakan dan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Sampai tahun 2019, kegiatan tahun 2019 telah dibentuk 160 satgas penanggulangan bencana pada seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang, bahkan di tingkat Kota Padang Panjang telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) penanggulangan bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Satgas yang dibentuk tersebut, keberadaannya diharapkan dapat memperlancar penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinir.

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, penanggulangan bencana secara bertahap telah dilaksanakan, sasaran seluruh masyarakat di 16 Kelurahan di Kota Padang Panjang, dengan harapan masyarakat Kota Padang Panjang

memiliki kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada tahap tanggap darurat, mengacu pada bencana yang pernah terjadi di Kota Padang Panjang, seperti kebakaran, angin ribut (pohon tumbang), longsor dan banjir yang telah dilaksanakan kegiatan penanganan terhadap bencana tersebut, mulai dari melakukan pengkajian cepat terhadap dampak dari bencana yang terjadi, penetapan status tanggap darurat untuk memudahkan dalam penyelamatan dan evakuasi dari korban bencana sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana tersebut.

Pada tahap pasca bencana, BPBD Kesbangpol memberi rekomendasi untuk masyarakat di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Di bidang kesatuan bangsa dan politik, telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba, wawasan kebangsaan, menciptakan stabilitas politik yang kondusif serta mewujudkan kondisi yang damai, aman, nyaman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta penyampaian informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan tersebut

Untuk mewujudkan Fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip disiplin yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Pelaksanaan anggaran, dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD Kota Padang Panjang

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD, Kesbangpol sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD,**  
**Kesbangpol Kota Padang Panjang**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi					Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Kelurahan Tangguh Bencana			2 Kelurahan	8 Kelurahan	12 Kelurahan	14 Kelurahan	16 Kelurahan	2 Kelurahan	-	-	-	-	2 Kelurahan	-	-	-	-	
2.	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	
3.	Jumlah peserta jambore pengurangan rasiko bencana			15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	-	-	-	-	15 orang	-	-	-	-	Jambore Tingkat Privinsi
4.	Jumlah masyarakat yang di latih dan aparat			160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	-	-	-	-	160 orang	-	-	-	-	
5.	Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi PB				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Respon time Tanggap Darurat			18 menit	17 menit	15 menit	13 menit	10 menit	18 menit	-	-	-	-	18 menit	-	-	-	-	
7.	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional			22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	-	-	-	-	22 orang	-	-	-	-	
8.	Jumlah kasus yang tangani			100 kasus	95 kasus	90 kasus	85 kasus	80 kasus	100 kasus	-	-	-	-	100 kasus	-	-	-	-	
9.	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan			20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	-	
10.	Lama waktu pendistribusian logistik			170 menit	160 menit	155 menit	150 menit	145 menit	170 menit	-	-	-	-	170 menit	-	-	-	-	
11.	Lama waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			48 jam	45 jam	42 jam	39 jam	36 jam	48 jam	-	-	-	-	48 jam	-	-	-	-	
12.	Jumlah kerusakan yang di verifikasi			50 kasus	48 kasus	46 kasus	44 kasus	42 kasus	50 kasus	-	-	-	-	50 kasus	-	-	-	-	
13.	Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang dilaksanakan			1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	-	-	-	-	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	-	-	-	-	
14.	Persentase penanganan konflik sosial di kelurahan			60%	70%	75%	80%	85%	60%	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	
15.	Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda			50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 orang	-	-	-	-	60 orang	-	-	-	-	
16.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada			Pemilu serentak 71%	Pilgub 56%			Pilkada 73%	Pemilu serentak 81%	-	-	-	-	Pemilu serentak 81%	-	-	-	-	
17.	Jumlah peserta penyuluhan P4GN			90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	50 orang	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	Di Anggaran Cuma 50 Orang karena evesiensi anggaran
18.	Jumlah komunitas intelijen daerah (Kominda) yang			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Kominda 2019 Telah dihapus sesuai dengan ...

	dilaksanakan																		
19.	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 orang	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-		
20.	Jumlah kasus FKUB yang di tangani		2 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	-	-	-	-	2 kasus	-	-	-	-		
21.	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi		11 orang/LSM	11 orang/LSM	11 orang/LSM	11 orang/LSM	11 orang/LSM	11 orang/LSM	-	-	-	-	11 orang/LSM	-	-	-	-		
22.	Persentase konflik sosial yang tertangani		60%	70%	75%	80%	85%	85%	-	-	-	-	60%	-	-	-	-		
23.	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar		1 angkatan 50 org	1 angkatan 50 org	1 angkatan 50 org	1 angkatan 50 org	1 angkatan 50 org	1 angkatan 50 org	-	-	-	-	1 angkatan 50 org	-	-	-	-		
24.	Jumlah tim terpadu dan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan		3 kasus, 65 ormas	3 kasus, 65 ormas	3 kasus, 65 ormas	3 kasus, 65 ormas	3 kasus, 65 ormas	65 ormas	-	-	-	-	65 ormas	-	-	-	-		
25.	Jumlah pemilih yang dididik		100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-	-		
26.	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina		14 parpol	14 parpol	14 parpol	14 parpol	14 parpol	14 parpol	-	-	-	-	14 parpol	-	-	-	-		
27.	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	50 orang	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	Di Anggaran Cuma 50 Orang karena evesiensi anggaran	
28.	Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	-	-	-	-	3 bulan	-	-	-	-		

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD, Kesbangpol.**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan BPBD, Kesbangpol kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra BPBD, Kesbangpol, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, Kesbangpol.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, Kesbangpol dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, Kesbangpol.

#### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai BPBD, Kesbangpol yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana maupun dalam fungsinya sebagai Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, sampai tahun 2019 ini BPBD, Kesbangpol telah banyak peningkatan dan berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, walaupun belum sempurna yang di inginkan, karna masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, khususnya peralatan dalam penanggulangan bencana.



### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan pelayanan dan tugas BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan untuk menjalankan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, khususnya peralatan dalam penanggulangan bencana. Belum tersedianya Kantor yang Representatif serta belum lengkapnya peralatan penanggulangan bencana: Escapator mini untuk Penanggulangan Bencana tanah lonsor, banjir, serta alat komunikasi Radio dan HT
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. karena terbatasnya pendanaan tentang pelatihan/diklat bagi masyarakat Kelurahan, untuk itu perlu dilakukan Pendidikan dan pelatihan tentang resiko Pengurangan Bencana serta pembentukan kelompok Siaga Bencana yang belum terbentuk untuk menuju Kelurahan Tangguh Bencana.
3. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang, yang mana pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan Stabilitas daerah Tahun 2019 memang tidak memenuhi target, dimana dari 8 (delapan) kali di anggarkan, namun hanya terlaksana sebanyak 4 (empat) kali. Disamping itu pada Tahun 2019 dengan adanya agenda Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden juga menyebabkan susahnyanya mengatur jadwal rapat para Anggota Tim Stabilitas Daerah

### **2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional**

Secara umum program kegiatan yang menjadi alat untuk pencapaian kinerja BPBD, Kesbangpol telah memenuhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

### **2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Beberapa faktor internal yang dimiliki, setelah dilakukan analisis sangat mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan harus dimanfaatkan secara baik. Faktor internal tersebut berupa kekuatan yang ada pada organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang mendukung dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana dan pelayanan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, ketersediaan anggaran dan semangat aparatur yang dimiliki termasuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan.

Disamping kekuatan yang dimiliki, masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi antara lain, Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana , Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam , Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba (P4GN)

yang merupakan pencapaian visi dan misi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, tingginya partisipasi relawan dalam penanggulangan bencana dan terjalannya kerjasama dengan BPBD kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam penanganan bencana, merupakan peluang eksternal yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan BPBD Kesbangpol. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sertasemakin meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik, ditandai dengan menjamurnya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkeinginan untuk mengawasi/peduli semua aktifitas yang ada di Kota Padang Panjang.

#### **2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.**

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD, Kesbangpol selama periode sebelumnya maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2018-2023) adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Kelurahan Tangguh Bencana
2. Respon time Tanggap Darurat dan Pendistribusian Logistik saat kejadian bencana
3. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
4. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang.

# 3

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 tercantum Visi Kota Padang Panjang ” **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 4 pilar antara lain pilar pertama **Ekonomi**, pilar kedua dan tiga **Pendidikan, Sosial dan Keagamaan**, pilar keempat **Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat**, dan 3 misi yakni :

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif;

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya pembangunan yang ada di Kota Padang Panjang baik dari segi fisik maupun non fisik. Sedangkan misi yang diemban oleh BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang dengan mengacu pada misi 1 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Maka dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka visi BPBD, Kesbangpol tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

” **Mewujudkan Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana, dan stabilitas politik daerah yang terkendali** ”

Berpijak kepada hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai makna pokok yang terkandung dalam visi diatas sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur BPBD, Kesbangpol.
2. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat.
3. Memberdayakan seluruh sumber daya bebencanaan di Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan good governance.
4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatanterbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan Stabilitas keamanan dan politik di Kota Padang Panjang.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai penjabaran dari misi serta sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan.

#### **A. TUJUAN**

Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana dimaksudkan adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang siap, tanggap dalam menghadapi bencana dan memiliki kesadaran terhadap resiko bencana, meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan dan terselenggaranya penanggulangan bencana, yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;

2. Padang Panjang dengan stabilitas politik yang terkedali dimaksudkan adalah terciptanya kondisi daerah yang kondusif dengan berperannya seluruh elemen masyarakat.

## **B. SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.
2. Terwujudnya pengutan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap resiko bencana.
4. Mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen.

### **3.3 Program dan Kegiatan Renja SKPD**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel TC.33 dibawah ini:



# 4

## PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat OPD, BPBD, Kesbangpol telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD, Kesbangpol) Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPBD, Kesbangpol. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing.

Sehubungan dengan ini maka BPBD, Kesbangpol juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja BPBD, Kesbangpol (Renja BPBD, Kesbangpol) tahun 2021 Renja BPBD, Kesbangpol ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPBD, Kesbangpol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur BPBD, Kesbangpol, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsure BPBD, Kesbangpol dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang.



Dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPBD, Kesbangpol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Januari 2020

Kepala BadanPenanggulangan Bencana Daerah,  
Kesbangpol Kota Padang Panjang

MARWILIS, SH,M.Si  
NIP.19610703 198203N1008

# 5

## PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat OPD, BPBD, Kesbangpol telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD, Kesbangpol) Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPBD, Kesbangpol. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing.

Sehubungan dengan ini maka BPBD, Kesbangpol juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja BPBD, Kesbangpol (Renja BPBD, Kesbangpol) tahun 2021 Renja BPBD, Kesbangpol ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPBD, Kesbangpol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur BPBD, Kesbangpol, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD, Kesbangpol juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsure BPBD, Kesbangpol dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang.

Dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPBD, Kesbangpol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, 23 Maret 2020

Kepala BadanPenanggulangan Bencana Daerah,  
Kesbangpol Kota Padang Panjang

MARWILIS, SH,M.Si  
NIP.19610703 198203N1008



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**RENCANA KERJA**

**( RENJA )**

**TAHUN 2021**

**BPBD, KESBANGPOL  
KOTA PADANG PANJANG**

# DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematis RENJA BPKD	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD, KESBANGPOL TAHUN 2017	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	18
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD, Kesbangpol	23
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	28
	3.3 Program dan Kegiatan Renja OPD	29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	PENUTUP	33



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BPBD, Kesbangpol	1 Rada 6, 7 unit roda 4, 12 unit roda 2, 3 orang THL	318,060,000	APBD		1 Rada 6, 7 unit roda 4, 12 unit roda 2, 3 orang THL	349,866,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	BPBD, Kesbangpol	2 orang THL, 1 unit	79,131,600	APBD		2 orang THL, 1 unit	87,044,760
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	BPBD, Kesbangpol	24 kali	50,000,000	APBD		24 kali	55,000,000
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	BPBD, Kesbangpol	12 bulan	390,000,000	APBD		12 bulan	429,000,000
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	BPBD, Kesbangpol	2 orang THL, 12 bulan	61,600,000	APBD		2 orang THL, 12 bulan	67,760,000
									-
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>77,500,000</b>				<b>85,250,000</b>
	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	jumlah alat-alat kantor yang dibeli dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPBD, Kesbangpol	5 unit PC, 3 unit laptop, 5 unit printer	-	APBD		40 meter	-
	Pengadaan meubeler	jumlah meubeler	BPBD, Kesbangpol	44 unit	-	APBD		44 unit	-
	Pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor	jumlah gedung kantor dan alat-alat kantor yang dipelihara	BPBD, Kesbangpol	1 gedung dan 12 bulan	77,500,000	APBD		1 gedung dan 12 bulan	85,250,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	BPBD, Kesbangpol		-	APBD		80 stell	-
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>			-				-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	BPBD, Kesbangpol	6 orang	-	APBD		6 orang	-
	<b>Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	<b>Kelurahan Tangguh Bencana</b>			<b>161,590,000</b>				<b>177,749,000</b>
	Pelaksanaan upaya pengurangan resiko bencana	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan, jumlah masyarakat dan aparatur yang dilatih dan jumlah rambu-rambu bencana yang tersedia dan terpelihara	BPBD, Kesbangpol	4 kali, 140 orang dan 1 paket	-	APBD		4 kali, 140 orang dan 1 paket	-
	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Provinsi, Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Kota	BPBD, Kesbangpol	15 orang, 160 orang	52,090,000	APBD		15 orang, 160 orang	57,299,000
	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi PB	BPBD, Kesbangpol	1500 orang	-	APBD		1500 orang	-
	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan bencana Alam	Jumlah peserta yang ikut pelatihan	BPBD, Kesbangpol	160 orang	109,500,000	APBD		160 orang	120,450,000
	<b>Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</b>	<b>Lama waktu pendistribusian logistik</b>			<b>1,252,912,000</b>				<b>1,378,203,200</b>





KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang, Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada			912,290,000				1,003,519,000
	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	BPBD, Kesbangpol	50 orang	65,050,000	APBD		90 orang	71,555,000
	Kewaspadaan Dini daerah	Jumlah pertemuan tim	BPBD, Kesbangpol	12 kali	-	APBD		12 kali	-
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	BPBD, Kesbangpol	50 orang	77,070,000	APBD		50 orang	84,777,000
	Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	Jumlah kasus FKUB yang di tangani	BPBD, Kesbangpol	6 Pertemuan	20,800,000	APBD		6 Pertemuan	22,880,000
	Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	BPBD, Kesbangpol	11 orang/ LSM	32,700,000	APBD		11 orang/ LSM	35,970,000
	Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial	persentase konflik sosial yang tertangani	BPBD, Kesbangpol	70%	328,200,000	APBD		6 Pertemuan ( Koordinasi )	361,020,000
	Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar	BPBD, Kesbangpol	1 angkatan 50 org	307,800,000	APBD		1 angkatan 50 org	338,580,000
	Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang dibina dan jumlah kantor bersama yang dikelola	BPBD, Kesbangpol	3 kasus, 65 ormas dan kantor bersama	41,600,000	APBD		3 kasus, 65 ormas dan kantor bersama	45,760,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		6	7	8		10
	Pembinaan Administrasi Bantuan Partai	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina	BPBD, Kesbangpol	8 Parpol	39,070,000	APBD		8 Parpol	42,977,000
					<b>3,427,833,600</b>				<b>3,770,616,960</b>

Padang Panjang, 23 Maret 2020  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG**

**MARWILIS, SH, M.Si**  
**NIP. 19610703 198203N1008**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		6	7	8		10

|

|



|

|



|

|

|